

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berliana Budi Pratiwi¹, Reno Affrian², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : berlianabudi1717@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan *good governance* yang baik menjadi suatu keharusan dalam organisasi publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, penerapan *good governance* pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang maksimal karena pemberian informasi terkait profil Bappedalitbang yang belum dikelola menyeluruh masih belum optimal, kurangnya kepekaan dan responsif pegawai dalam menanggapi aspirasi masyarakat, dan tata pemerintahan yang belum sepenuhnya optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan *good governance* pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif, penarikan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang berjumlah 12 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator kemudahan kurang baik, karena mendapatkan informasi maupun data terkait Bappedalitbang sulit diminta. Indikator informasi kurang baik, karena sulit mendapatkan informasi profil yang didapat terkait Bappedalitbang. Indikator respon kurang baik, karena kurangnya penanganan terkait proposal yang sudah dilakukan dan prosesnya yang lama. Indikator tepat waktu kurang baik, karena adanya sebagian ASN yang masih kurang tepat waktu dalam kehadiran. Indikator pencapaian target kurang baik, karena hilangnya kepercayaan terhadap tim atau individu yang disebabkan kurangnya ASN yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan.

Kata Kunci : *Good governance*, Bappedalitbang

ABSTRACT

The implementation of good governance is a must in public organizations to increase transparency, accountability, and community participation in decision making. However, the implementation of good governance at the Regional Planning Agency for Research and Development of Hulu Sungai Utara Regency is still not optimal because the provision of information related to the Bappedalitbang profile which has not been thoroughly managed is still not optimal, the lack of sensitivity and responsiveness of employees in responding to community aspirations, and governance that has not been fully optimized. The purpose of this study was to determine the implementation of good governance at the Regional Planning Research and Development Agency of Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. The research method used is a descriptive type qualitative approach, the withdrawal of informants is done by purposive sampling



which totals 12 people. The results of this study indicate that the implementation of good governance at the Regional Planning Research and Development Agency of Hulu Sungai Utara Regency is quite good. This can be seen from the indicator of poor convenience, because getting information and data related to Bappedalitbang is difficult to request. The information indicator is not good, because it is difficult to get profile information obtained regarding Bappedalitbang. The response indicator is not good, because of the lack of handling related to proposals that have been made and the long process. The punctuality indicator is not good, because there are some ASN who are still not on time in attendance. The target achievement indicator is not good, due to the loss of trust in the team or individual caused by the lack of ASN which results in obstruction of work.

Keywords: Good governance, Bappedalitbang

PENDAHULUAN

Penerapan sebagai langkah individu atau kelompok menuju tujuan yang telah ditetapkan (J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain). Menurut (Setiawan, 2004:24) penerapan memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif untuk menyatukan tujuan dan tindakan. *Good Governance* merupakan konsep yang fokus pada proses keputusan dan pelaksanaan yang akuntabel secara bersama. Menurut (Koiman, 2009:17) *governance* merupakan interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurut (Zulkarnain, 2002:21) *good governance* penting bagi masyarakat Indonesia karena mengejar tujuan pemerintahan yang baik dan demokratis melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga dapat memudahkan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Good Governance di Indonesia mulai diterapkan sejak era reformasi, membutuhkan proses demokrasi yang bersih. *Good governance* menjadi alat reformasi penting dalam pemerintahan baru. Namun, mencapai *good governance* tidaklah mudah, *Good Governance* mungkin diartikan sebagai praktek tata kelola yang baik. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan suatu perubahan menyeluruh disemua elemen lembaga yang terlibat dalam praktik tata pemerintahan baik diantar lain pemerintah sebagai : perwakilan negara, yaitu pasar dan pelaku usaha, serta masyarakat sipil sehingga semua dapat memainkan peran yang saling melengkapi dan optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan pembangunan yang baik pemerintahan memiliki kerumitan yang tinggi dan kendala yang besar, maka sangat perlu langkah yang strategis untuk reformasi praktik tata kelola yang baik dan membangun *Good governance* akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pemerintahan yang bersih dan baik diinginkan oleh warga negara untuk menyelesaikan masalah tata kelola industry. Hukum menjadi dasar dalam mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan birokrasi yang

lebih baik untuk memastikan kesuksesan *good governance* di Indoneisa (Anonim,2009).

Masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintah sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring dengan banyak nya kasus pelayanan publik yang kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. SDM aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang di miliknya masih banyak di lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga tidak heran jika di berbagai instansi pemerintah masih saja ada penumpuka pegawai yang mengakibatkan in-efisiensi dari kinerja. Dengan demikian, hal ini akan berpengaruh terhadap layanan yang diberikan dengan berbagai sebab dan akibat yang di timbulkannya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan telah diadakan pendidikan, penataran kursus yang menyangkut masalah teknis dan administratif. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan volume tugas yang meningkat dan pesat. Begitu pula penerapan *good governance* pada bappedalitbang.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan telah diadakan pendidikan, penataran kursus yang menyangkut masalah teknis dan administratif. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan volume tugas yang meningkat dan pesat. Begitu pula penerapan *good governance* pada bappedalitbang

Perwujudan *Good governance* akan lebih mudah jika dimulai dengan reformasi pelayanan publik karena penerapan nilai-nilai *Good governance* dalam praktik pelayanan publik relatif lebih mudah daripada melembagakan semua nilai tersebut di seluruh aspek kegiatan pemerintahan. Penyelenggaraan *Good governance* merupakan syarat utama untuk mewujudkan cita-cita rakyat dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan sistem akuntabilitas yang nyata, jelas dan tepat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola yang baik dalam organisasi publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggungjawab. Bappedalitbang dapat memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terselenggaranya *Good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan bersih bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk mengetahui meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses yang sama informasi bagi masyarakat luas. Namun, implementasi *good governance* di Bappedalitbang masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah-masalah seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta minimnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program masih sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Bappedalitbang,

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. penerapan *good governance* pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai tantangan, yang dimana penerapan *good governance* pada Bappedalitbang memerlukan pengembangan sistem akuntabilitas yang nyata, jelas dan tepat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan bertanggung jawab. Adapun permasalahan yang ada pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Penerapan *good governance* kurang optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena dalam memberikan informasi terkait profil yang belum dikelola secara menyeluruh walaupun pihak dinas terkait sudah menyediakan situs/*website*.
2. Kurangnya kepekaan dan responsive pegawai dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Contoh salah satu masyarakat mengajukan proposal sesuai perjanjian besok ternyata tidak sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.
3. Tata pemerintahan yang belum sepenuhnya optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena masih adanya hambatan yaitu kurangnya sumber daya ASN.

METODE

Penelitian ini membahas tentang penerapan *good governance* pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peneliti menggunakan metodologi kualitatif , yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah mencari makna, pemahaman, pengertian, vershen tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui tentang Penerapan Good governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang Penerapan Good governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian kualitatif menurut Bogdan Taylor (V. Wiratna Sujarweni, 2020:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komorensif, dan holistik. Anggara (2015:21) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah ‘penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam’. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada

responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan segala pertanyaan difokuskan pada permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data yang diperoleh sebelumnya. , observasi Adapun yang peneliti maksudkan disini adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek permasalahannya, kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang terkait serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik analisis data dan model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, Saldana (2014: 1214). Komponen dalam analisis data Miles, Hurberman dan Saldana (2014: 12-13) sebagai berikut:

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing).

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Uji kredibilitas data Sugiyono menyatakan bahwa (2014:270), bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian.

1. Perpanjangan Waktu Penelitian

Peneliti berperan sebagai instrument dalam penelitian kualitatif sehingga keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Peneliti harus yakin selagi penelitian belum cukup meyakinkan, maka perlu melakukan perpanjangan waktu penelitian sambil mengkaji kembali data yang telah terkumpul.

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Salah satu hal yang sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan, peneliti perlu melakukan pengecekan kembali

apakah data yang telah terkumpul sudah benar atau salah dan hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, teknik ini mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul untuk pengecekan serta pembandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi terdiri dari beberapa bagian

4. Menggunakan Referensi yang Tepat

Artinya melakukan kasus negatif peneliti mencari data yang berbeda bahkan bertentangan dengan data yang telah didapat. Jika tidak ada lagi data yang bertentangan atau berbeda dengan yang diperoleh maka data yang ditemukan sudah bisa dipercaya

5. Mengadakan Membercheck.

Data yang dituliskan dari hasil penelitian lapangan atau rekaman percakapan dapat dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan. Bahan referensi ini adalah sebagai bahan acuan atau pendukung untuk membuktikan data yang telah diperoleh. Bahan yang dimaksud disini berupa alat perekam, kamera atau lain sebagainya yang bisa digunakan selama melakukan penelitian. Sumber data diambil melalui teknik purposive sampling yang berjumlah 12 orang. Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* menurut (Agus Dwiyanto,2014:79), yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, dan responsif.

PEMBAHASAN

1. Partisipasi

Partisipasi yang terdiri dan indikator kontribusi dan pendapat memberikan aspirasi. Indikator kontribusi yang ada di Bappedalitbang sudah baik, karena adanya perencanaan dan pembangunan melalui tahap-tahap seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang bertujuan untuk memberikan panduan strategis bagi pemerintahan dalam mengalokasikan sumber daya dan menimplementasikan program pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi dalam penerapan good governance pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator pendapat memberikan aspirasi sudah baik, karena dalam aspirasi/pendapat yang sudah diberikan secara baik melalui adanya acara musrenbang. . Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa bentuk memberikan aspirasi/pendapat dalam penerapan governance pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sesuai.

2. Transparansi

Transparansi yang terdiri dari indikator kemudahan dan informasi. Indikator kemudahan kurang baik, karena dalam hal dari segi meminta informasi maupun data terkait dari pihak Bappedalitbang ini sulit diminta. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa transparansi harus memiliki aspek kemudahan dalam meminta informasi yang diinginkan.

Indikator informasi kurang baik, karena sulitnya mendapatkan informasi yang didapat terkait Bappedalitbang dan website yang diakses juga tidak menyeluruh. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa informasi sangat diperlukan untuk memperdalam akses yang dijangkau oleh masyarakat.

3. Akuntabel

Akuntabel yang terdiri dari indikator pertanggungjawaban dan respon menerima aspirasi masyarakat. Indikator pertanggungjawaban sudah baik, karena dilihat dari segi SDM yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa tanggungjawab perlu dilakukan karena menyangkut hasil dari perencanaan itu sendiri.

Indikator respon menerima aspirasi masyarakat kurang baik, karena dalam pengajuan proposal ini prosesnya lama bahkan tidak ada balasan sekalipun. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa respon perlu diutamakan dalam menerima aspirasi dari SKPD maupun masyarakat.

4. Efektif dan Efisien

Efektif dan efisien terdiri dari indikator tepat waktu datang kerja dan pencapaian target. Indikator tepat waktu datang kerja kurang baik, karena sebagian ASN yang masih kurang tepat waktu dalam hal kehadiran datang, walaupun adanya aplikasi SPP (Sistem Informasi Presensi) pegawai guna adanya absensi online. Tetapi pegawai setelah absen pulang kerumah, bahkan ada yang tidak absen sama sekali. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa dilihat dari ketepatan kedisiplinan pegawai dalam tepat waktu masih kurang baik.

Indikator pencapaian target kurang baik, karena dilihat dari adanya permasalahan pada bagian perencanaan merespon terkait laporan-laporan yang masuk setiap harinya apabila salah menangani akan membuat kinerja mereka buruk, namun pegawai terkadang bertele-tele dalam memberikan suatu hal yang memang harus diselesaikan dan dikarenakan kurangnya ASN. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa target harus dicapai agar suatu tujuan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum terdiri dari indikator keamanan terhadap database/arsip. Indikator keamanan terhadap database/arsip sudah baik, karena keamanan dalam database di Bappedalitbang sudah terjaga dengan baik. Arsip yang berbentuk kertas diletakkan perbidang masing-masing, sedangkan data bentuk non-fisik atau elektronik disimpan di drive atau file-file khusus. Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa terlihat dari database secara nasional pada database kementerian dalam negeri/bappenas kalau secara aplikasi, untuk kearsipan dan data di Bappedalitbang sudah menyesuaikan keamanannya.

6. Responsif

Responsif terdiri dari indikator kepekaan dan cepat tanggap. Indikator kepekaan sudah baik, karena dilihat dari kepekaan pegawai dalam permasalahan-permasalahan perencanaan selalu siap untuk menerima dan menanganinya. Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa dilihat dari peka nya para pengelola instansi publik terhadap masyarakat.



Indikator cepat tanggap sudah baik, karena dilihat dari pegawainya sudah cepat dalam mengambil keputusan ada masalah apapun selalu mereka diskusikan dan segala sesuatunya selalu terbuka dalam bentuk merespon. Hal ini sesuai dengan teori (Agus Dwiyanto,2014:79) bahwa dilihat dari cepat tanggapnya pegawai dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait perencanaan.

SIMPULAN

Penerapan *Good Governance* Pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dilihat dari aspek partisipasi yang ditandai dengan indikator kontribusi di Bappedalitbang sudah baik dan indikator pendapat memberikan aspirasi sudah baik. Aspek transparansi yang ditandai dengan indikator kemudahan kurang baik dan indikator informasi kurang baik. Aspek akuntabel yang ditandai dengan indikator pertanggungjawaban sudah baik dan indikator respon kurang baik. Aspek efektif dan efisien yang ditandai dengan indikator tepat waktu datang kerja kurang baik dan indikator pencapaian target kurang baik. Aspek kepastian hukum yang ditandai dengan indikator keamanan database sudah baik. Aspek responsif yang ditandai dengan indikator kepekaan sudah baik dan indikator cepat tanggap sudah baik. Faktor yang mempengaruhi Penerapan *Good Governance* Pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong terdiri dari kontribusi/memberikan aspirasi yang baik kepada SKPD atau masyarakat, keamanan arsip.database yang terjaga dengan baik, dan kepekaan/cepat tanggap dalam merespon permasalahan yang baik. Faktor penghambat terdiri dari sulitnya meminta data informasi dari pihak Bappedalitbang, sulitnya mengakses dan mendapatkan profil di website, respon menerima aspirasi masyarakat yang masih kurang tepat, dan kurangnya kedisiplinan pegawai terhadap jam masuk kerja Penerapan *good governance* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator Pertama, Partisipasi pada indikator kontribusi di Bappedalitbang ini sudah baik karena sudah menyusun anggaran dan perencanaan, menjalankan tugas dan fungsinya. Pada indikator pendapat memberikan aspirasi tersebut sudah baik, karena dalam aspirasi/pendapat yang sudah diberikan secara baik melalui adanya acara musrenbang. Kedua, Transparansi pada indikator kemudahan pada Bappedalitbang tersebut kurang baik, karena segi kemudahan mendapatkan informasi maupun data terkait dari pihak bappedalitbang ini sulit diminta. Pada indikator informasi kurang baik, dilihat dari sulitnya mendapatkan informasi profil yang didapat terkait Bappedalitbang. Ketiga, Akuntabel pada indikator pertanggungjawaban sudah baik,dilihat dari segi pegawai kualitas SDMnya yang baik bertanggungjawab. Pada indikator Respon kurang baik, dilihat dari kurangnya penanganan terkait proposal yang sudah dilakukan dan lama prosesnya . Keempat, Efektif dan efisien pada indikator tepat waktu datang kerja pada Bappedalitbang tersebut kurang baik,dilihat dari adanya sebagian ASN yang masih kurang tepat waktu dalam hal kehadiran datang. Pada indikator target pencapaian terhadap permasalahan pada Bappedalitbang tersebut kurang baik, dilihat dari pencapaian target yang tidak sesuai mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap tim atau individu, karena disebabkan kekurangannya ASN yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan . Kelima, Kepastian hukum pada indikator keamanan database sudah baik,dilihat dari keamanan dalam database di Bappedalitbang sudah terjaga dengan sudah baik. Keenam, Responsif pada indikator kepekaan sudah baik, hal ini dilihat dari

kepekaan pegawai dalam permasalahan-permasalahan perencanaan selalu siap untuk menerima dan menanganinya. Pada indikator cepat tanggap sudah baik, hal ini dilihat dari pegawainya sudah cepat tanggap dalam mengambil keputusan ada masalah apapun selalu mereka diskusikan terlebih dulu Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Good governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari faktor pendorong dan faktor penghambat terdiri dari kemudahan dalam sulitnya meminta data informasi dari pihak bappedalitbang ketika meminta data terkait. Sulitnya mengakses dan mendapatkan profil diwebsite karena tidak bisa mengakses secara mendalam (privasi). Dan respon menerima aspirasi masyarakat masih kurang tepat, kemudian juga masih kurangnya kedisiplinan pegawai terhadap jam masuk kerja dilihat dari sehabis absen online kembali kerumah lagi. Pencapaian target yang belum optimal yang mengakibatkan SKPD sulit mengambil keputusan. Faktor pendorong terdiri dari kontribusi/memberikan aspirasi sudah baik kepada SKPD atau masyarakat. Keamanan arsip/databse yang terjaga dengan baik dan sudah disediakan untuk menampung asripan/database tersebut. Dan kepekaan dan cepat tanggap dalam merespon permasalahan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2014). *Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Dasar Hukum dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintaha yang baik.*
- Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.
- Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.
- Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.
- Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.
- Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.
- Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.
- Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN



- PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.’, *Al’iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.
- Noorrahman, M.F. (2023) ‘Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai’, *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.
- Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) ‘PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) ‘PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.
- Setiawan, I. (2022) ‘Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.
- Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Setia. Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*.
- Koiman. (2009). *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mohammad, S.Z. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Setiawan. (2004). *Naskah Akademis RUU Sinas Iptek*. 2018.
- Zulkarnain. (2002). *Kendala Terwujudnya Good Governance*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

